



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI KUSUMASTUTI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK
PENGENDALIAN PENCEMARAN INDUSTRIAL
3. NHK : 1006059

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.050.000.000**

1. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 895 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/160 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, WARISAN Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/145 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 1.650 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 464 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL
SENDIRI Rp. 220.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/73 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **99.000.000**

1. MOBIL, KIA CARNIVAL DIESEL Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.



60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 7.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 105.087.565

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 81.153.502

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.342.741.067

III. HUTANG

Rp. 80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.262.741.067

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.